

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia diantaranya yaitu aspek ekonomi. Ajaran islam mengenai ekonomi ini terdapat pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama maupun praktik-praktiknya dalam sejarah. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian islam sangat besar terkait masalah ekonomi. Q.S Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam surah Al-Baqarah. Ayat terpanjang ini bukan berisi masalah ibadah dan aqidah, melainkan berisi mengenai masalah ekonomi atau ekonomi dalam hukum islam (Andrianto dan Firmansyah, 2019).

Salah satu badan ekonomi dan keuangan yang terbentuk saat ini adalah Perbankan. Perbankan merupakan suatu lembaga yang melakukan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan, meminjamkan, dan jasa pengiriman uang. Dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, fungsi-fungsi utama tersebut adalah menerima titipan berupa harta, qardh yang merupakan kegiatan meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi, dan menginvestasikan uang untuk keperluan bisnis yang dilakukan melalui mudharabah dan musyarakah, serta melakukan jasa pengiriman dan tukar-menukar uang atau dalam islam disebut *Al-Sharf* (Andrianto dan Firmansyah, 2019).

Bank Islam atau biasa disebut Bank Syariah merupakan bank yang tidak mengandalkan bunga dalam pengoperasiannya. Bank tanpa bunga atau bank syariah ini berlandaskan pada Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad para ulama. Bank islam merupakan lembaga keuangan yang memberikan layanan berupa produk-produk pembiayaan yang dalam pengoperasiannya sesuai dengan syariat islam (Rusby, 2017).

Kinerja keuangan merupakan gambaran dari hasil ekonomi yang dapat diraih oleh suatu perusahaan pada periode-periode tertentu melalui aktivitas-aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan secara efektif dan efisien. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai dari menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Informasi pada posisi keuangan dan kinerja keuangan pada masa kini akan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memberikan gambaran bagaimana kinerja keuangan perusahaan dalam satu periode (Riswan dan Kesuma, 2014). Menurut pernyataan PSAK 1 (revisi 2009) yang dikeluarkan oleh IAI, dijelaskan bahwa dalam suatu perusahaan diwajibkan untuk membuat laporan keuangan yang dalam penyajiannya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (Wantah, 2015). Perusahaan perlu menerapkan kebijakan dan strategi guna meningkatkan produktivitas operasional perusahaan dan memelihara pengendalian internal yang memadai. Didalam perkembangannya, suatu

perusahaan perlu pengawasan intern agar pengendalian internalnya tetap terjaga dan terkendali.

Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Penerapan *Good Corporate Governance* guna tercapainya kelola perusahaan yang lebih transparan bagi seluruh pengguna laporan keuangan. Bila penerapan konsep ini dilakukan dengan baik maka transparansi pengelolaan perusahaan juga akan terus membaik dan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan terus meningkat sehingga akan menguntungkan banyak pihak (Mediana dan Erinosa, 2020).

Penerapan mekanisme *good corporate governance* ini diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul dalam sebuah perusahaan sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Seluruh pemegang saham dan investor lainnya akan merasa aman dikarenakan hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi. Selain itu *good corporate governance* yang baik, akan membantu membangun lingkungan persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi. Dengan demikian, jika suatu perusahaan dapat menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan tersebut diharapkan kinerja perusahaannya menjadi lebih baik (Dedi, *et al.*, 2015).

Tabel 1.1
Beberapa Kasus Pelanggaran dan Penyimpangan GCG di Indonesia

Tahun	Perusahaan	Pelanggaran GCG
2018	BJB Syariah	Kredit Fiktif

2018	Bank Syariah Mandiri	Penipuan Pembiayaan Rumah
2019	BTPN Syariah	Penggelapan Dana Nasabah
2020	BNI Syariah	Hilangnya Dana Nasabah
2020	BRI Syariah	Investasi Bodong

Sumber: dikumpulkan dari berbagai sumber media

Banyaknya kasus penyimpangan GCG yang terjadi tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG di Indonesia sedang berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Salah satu kasus masih lemahnya penerapan Corporate Governance di Indonesia yaitu menurunnya kinerja keuangan perusahaan pada PT. Bank Muamalat Tbk. Disebutkan dalam sebuah artikel di internet, Tarmidzi Yusuf (Ibnu Maksum, <https://suaranasional.com/2019/>, akses 26 Nopember 2021) selaku Pemerhati Ekonomi Syari'ah mengemukakan terkait kemerosotan Bank Muamalat Indonesia sejak tahun 2017-2020. Kemerosotan kinerja Bank Muamalat ini dapat dibilang berpredikat terburuk sepanjang Bank Muamalat didirikan sejak 1992. Berdasarkan laporan keuangan Bank Muamalat yang dipublikasikan dalam situs web resminya, asset dan laba bersih mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Lebih parahnya, penurunan kinerja Bank Muamalat terjadi pada tahun 2020. Selain asset dan laba bersih yang mengalami penurunan, ROA dari Bank Muamalat sangat kecil. ROA merupakan penunjuk terkait seberapa andal Bank tersebut dalam meraup keuntungan. Penurunan kinerja keuangan perusahaan PT. Bank Muamalat Indonesia diisukan bahwa belum maksimalnya good corporate governance pada perusahaan tersebut sehingga kinerja perusahaannya mengalami penurunan.

Pengamat Ekonomi Syariah STEI SEBI, Axis Setiawan menyampaikan profitabilitas bank syariah akan mulai tertekan pada kuartal II. Secara keseluruhan akan berdampak pada profitabilitas tahun 2020 yang kemungkinan akan lebih rendah dari 2019. Peneliti mencoba menilai kinerja *good corporate governance* pada Bank Umum Syariah dengan menggunakan dewan direksi, komite audit, dewan pengawas syariah, dan kepemilikan institusional dengan tujuan untuk melihat seberapa efektif bank mengelola GCG dan menilai kinerja bank syariah dengan menggunakan *Return On Asset*. Dan tujuan penelitian ini untuk melihat seberapa baik kinerja keuangan pada beberapa bank syariah di Indonesia. Berikut data terkait dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit.

Tabel 1.2
Data GCG dan ROA pada Bank Umum Syariah Periode 2017-2021

No	Nama Bank	Tahun	Jumlah Dewan Direksi	Aktivitas Dewan Komisaris	Jumlah Komite Audit	ROA
1	Bank Muamalat Indonesia	2017	7	7	4	0,11%
2		2018	5	7	3	0,08%
3		2019	6	8	3	0,05%
4		2020	6	16	3	0,03%
5		2021	6	6	3	0,15%
1	Bank	2017	4	7	3	0,36%

2	Victoria	2018	6	3	3	0,32%
3	Syariah	2019	5	9	3	0,05%
4		2020	6	4	3	0,16%
5		2021	6	6	3	0,71%
1	Bank	2017	5	9	4	- 5,96%
2	Jabar	2018	2	12	6	0,54%
3	Banten	2019	3	7	5	0,60%
4	Syariah	2020	4	7	5	0,41%
5		2021	4	13	5	0,96%
1	Bank Panin	2017	3	8	3	- 10,77 %
2	Bank	2018	3	8	3	0,26%
3	Panin Dubai	2019	4	9	3	0,25%
4	Syariah	2020	3	7	3	0,06%

5		2021	4		11		3		-		6,72%	
1	Bank	2017	3		12		3				1,20%	
2		2018	4		12		3				1,20%	
3		BCA	2019	4		13		4			1,20%	
4		Syariah	2020	4		26		3				1,10%
5		2021	4		37		3					1,10%
1	BTPN	2017	5		7		4				11,2%	
2		2018	5		8		4				12,4%	
3		Syariah	2019	5		6		4				13,6%
4		2020	4		6		3					7,16%
5		2021	5		12		4					10,7%

Sumber: Data sekunder diolah (2022)

Dalam teori yang dikemukakan oleh Hartono dan Nugrahanti (2014) menyatakan bahwa semakin banyak dewan direksi akan membuat koordinasi dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan lebih maksimal. Lalu, dalam teori Fadila dan Gozali (2016) yang menyatakan bahwa rapat dewan komisaris adalah salah

bentuk aktivitas dewan komisaris dalam melakukan fungsi dan perannya sebagai pengawas dalam pelaksanaan dan implementasi good corporate governance.

Jika semakin banyak frekuensi aktivitas rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, maka akan mengurangi potensi terjadinya asimetri informasi sebab akses informasi tersebar dengan merata di dalam lingkup dewan komisaris. Kemudahan mendapatkan informasi-informasi tersebut akan menggiring dewan komisaris untuk mengambil keputusan yang tepat serta dewan komisaris dapat lebih mudah menanggulangi masalah yang akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Serta dalam teori Amelya dwi (2019) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin banyak pula pengendalian dan pengawasan yang dilakukan. Hal tersebut akan banyak mempertimbangkan banyak keputusan dari komite audit yang berasal dari pendidikan yang berbeda-beda.

Dari ketiga teori tersebut, jika dilihat pada data diolah, ada data-data dimana tidak sesuai dengan teori. Seperti pada data Bank BCA Syariah 2020 dimana jumlah dewan direksi sama banyak dengan periode sebelumnya, namun kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA mengalami penurunan persentase. Selanjutnya, seperti pada data Bank BCA Syariah periode 2020 juga, aktifitas rapat dewan komisaris dilakukan sebanyak 26 kali (lebih banyak dari periode sebelumnya), namun kinerja keuangan yang diprosikan dengan ROA mengalami penurunan.

Dan selanjutnya, pada bank BJB Syariah periode 2019, memiliki jumlah komite audit lebih sedikit dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tetapi persentase ROA pada periode 2019, lebih besar dari persentase ROA pada periode 2018 yang memiliki lebih banyak jumlah komite audit.

Penelitian mengenai pengaruh mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, diantaranya penelitian Benedictus dan Agustinus (2015). Penelitian ini menggunakan EPS (Earning Per Share) sebagai ukuran untuk mengukur kinerja keuangannya. Sampel yang digunakan pada penelitiannya ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2013. Secara parsial, ukuran dewan komisaris dan independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ukuran komite audit, kepemilikan manajerial, dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian, jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Pankhy Pradana dan Rahardja (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan direksi, dewan komisaris, dan ukuran terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan manufaktur sektor consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012. Hasil penelitiannya adalah untuk dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Alysha, Suhendro, dan purnama (2022) dalam penelitiannya mengenai pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan BUMN mendapatkan hasil bahwa ada pengaruh pada dewan direksi, dewan komisaris, dan current ratio terhadap kinerja keuangan yang diprosikan *Return On Asset*. Sementara itu, komite audit dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan return on asset.

Arifiningtyas Widyaningrum (2014) melakukan penelitian pengaruh audit internal, *intellectual capital*, dan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013. Hasil penelitiannya terkait 2 indikator *Good Corporate Governance* yang berupa dewan direksi dan komite audit mendapatkan hasil adanya pengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Indriati (2018) melakukan penelitian Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor *Food and Beverage* yang Listing di BEI pada Tahun 2014-2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari masing-masing dewan sebagai struktur atau organ dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja suatu perusahaan

masih beragam. Penelitian ini memfokuskan pada indikator dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menarik untuk diteliti sejauh mana tingkat keberhasilan perbankan syariah dalam menerapkan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja perbankan syariah. Penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode 2017-2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
2. Apakah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?
3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia?
4. Apakah Dewan Direksi, Komisaris, Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Direksi secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Komisaris secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* yang diproksikan Komite Audit secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh *Good Corporate Governance* yang di proksikan dengan Dewan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit terhadap kinerja keuangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan.



D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Penelitian ini tidak mengkaji seuruh faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian ini hanya mengkaji pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan.

2. Dari berbagai faktor atau dan karakteristik *Good Corporate Governance* yang akan digunakan, penelitian ini hanya dibatasi ukuran dewan direksi, dewan komisaris dan komite audit.
3. Penelitian ini hanya mengambil sampel yang diambil dari perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan lengkap melalui situs Otoritas Jasa Keuangan dan *website* perusahaan periode 2017-2021.
4. Data laporan keuangan dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan per 31 Desember 2017-2021.
5. Penelitian ini menggunakan ROA dalam menilai kinerja perusahaan karena dapat memberikan informasi yang paling baik.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis.

1. Kegunaan Akademis
 - a. Akademis, bisa dijadikan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya sebagai sarana dan untuk menambah wawasan.
 - b. Penulis, untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang dan aplikasi ilmu pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.
2. Secara Praktis
 - a. Menambah pengetahua akuntansi tentang pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan.
 - b. Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk menilai kinerja *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan pada perusahaan sektor

perbankan syariah di Indonesia sehingga investor dapat menggunakannya sebagai penambah informasi kepada investor mengenai kinerja keuangan perusahaan dengan melihat penerapan *good corporate governance* sehingga dapat dijadikan pertimbangan baik investor untuk melakukan keputusan investasi pada perusahaan secara tepat dan menguntungkan di masa yang akan datang.

